

## **Implementasi Kebijakan Program Berbasis Lingkungan Di Kelurahan Singkil Di Kota Manado**

*Nini Buluran<sup>1</sup>  
Frans Singkoh<sup>2</sup>  
Trintje Lambey<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program berbasis lingkungan di kelurahan singkil di kota manado . metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif.ada 4 metode yang digunakan dalam penelitian ini , informannya berjumlah 1 intasnsi pemerintah , 3 orang kepala lingkungan singkil , 2 Tokoh tasyarakat lingkungan singkil . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Teori George C. Edward III terdapat empat variabel yaitu: (1) Komunikasi. Pada aspek komunikasi sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi yang ada di kelurahan singkil dilakukan tetapi belum maksimal. Karena dilihat masyarakat belum paham dengan adanya program berbasis lingkungan di kelurahan singkil kota manado.sosialisa dalam program berbasis lingkunganini belum dapat berjalan dengan baik .(2) Sumber daya Pada aspek ini di lihat dari sumber daya yang ada di kelurahan singkil di mana sumber daya kemampuannya yang masih belum di perbaiki atau masih kurang kejelasan dalam terwujudnya suatu program yang sudah dijalankan namun masih belum ada kejelasan lewat komunikasi atau sosialiasa antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan singkil di kota manado . (3) Disposisi Aspek ini cukup rumit ini menjadi fsktor keterlambatan dana untuk memulai pembangunan. Kemudian disamping proposal penhajuan , pada tahap akhir kegiatan para kepala lingkungan harus membuat laporan pertanggung jawab hasil kegiatan yang dilakukan sehingga terjadi keluhan dari sebagian besar kepala lingkungan yang kurang mengerti bagaimana cara pembuatannya. (4) Struktur Birokrasi Pada aspek ini dilakukan menunjukkan sruktur birokrasi penerpan program PBL-MAPALUSE yang ada di kota manado sudah berjalan kurang baik karena tidak seusai dengan aturan yang ada. Selain itu , masyarakat merasa tidak sangat terbantu dengan adanya program ini.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan , Implemntasi Program , Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Program berbasis lingkungan ini yang ingin diangkat salah satu ialah program berbasis lingkungan (PBL) yaitu di sebut program Pembangunan berbasis lingkungan dan juga merupakan salah satu program andalan dari walikota manado. Hal tersebut ditegaskan oleh kepala BPMPK yang merupakan badan yang menangani program ini bahwa program berbasis ini di berikan kepada 504 lingkungan di 87 kelurahan dan 9 kecamatan sekota manado yang di tata dalam APBD tahun 2012 dengan Dana Stimulan 75.000.000 tiap lingkungan.

Dengan adanya program berbasis lingkungan ini . akan optimis kesejahteraan kelurahan dan Lingkungan akan meningkat. Agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Rencana Program maka perlu diadakan sosialisasi langsung ke setiap kelurahan yang ada di Kota Manado.

Di provinsi maupun kota-kota serta kelurahan di Indonesia mulai menggalakkan atau melahirkan program-program yang pro terhadap rakyat, tak terkecuali kota Manado terlebih khusus di Kelurahan Singkil Dua yang merupakan tujuan penelitian ini. Dengan begitu dilihat dari peraturan walikota Manado No 26A Tahun 2017, Tentang PBL-MAPALUS. dengan program-program yang mensejahterakan rakyat mulai ditampilkan, salah satu program yang ada di Kelurahan Singkil Dua di Kota Manado menjadi sasaran program PBL yaitu :

1. Infrastruktur ( jalan , lampu , gorong-gorong , saluran air , bak sampah)
2. Ekonomi (dana bergilir , modal usaha / usaha yang sedang jalan )
3. Sosial (pengadaan tenda,wireless,kursi, yang

seharusnya merupakan inventaris pemeintah kelurahan singkil dua yang dapat digunakan oleh masyarakat singkil sesuai dengan kebutuhannya).

Dalam menunjang program-program yang telah dirancang oleh pemerintah daerah terlebih khusus pemerintah kota manado tentang program pembangunan berbasis lingkungan membangun prasarana dan sosial ekonomi yang disingkat (PBL-MAPALUS), maka dikeluarkanlah peraturan daerah No. 9 Tahun 2011 tentang penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2015-2017, yang didalamnya mengatur tentang program-program jangka menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Singkil Dua di Kota Manado.

Di Kota Manado khususnya Kecamatan Singkil di Kelurahan Singkil Dua melahirkan program-program yang pro terhadap rakyat, tak terkecuali di Kelurahan Singkil Dua di Kota Manado yang merupakan tujuan penelitian ini. sejak terpilihnya walikota yang pada tahun 2015

Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) yang merupakan badan yang ditunjuk menangani program ini bahwa Program Pembangunan Berbasis Lingkungan yang diberikan kepada 504 lingkungan di 87 kelurahan dan 9 kecamatan se-Kota Manado yang di tata dalam APBD Tahun 2012 dengan dana stimulan Rp 75.000.000 ditiap lingkungan dinilai baik oleh masyarakat dan sangat pro rakyat. PBL Mapalus bukan merupakan proyek, tapi merupakan program yang dikelola langsung oleh masyarakat dan dananya langsung ke rekening Kelompok Masyarakat Mapaluse

(KMM), yang diketuai oleh kepala lingkungan (Humas Pemkot Manado).

Tahapan pelaksanaan ditingkat pemerintahan daerah mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada penguatan kapasitas pelaku, pemahaman terhadap program, tugas pokok dan fungsi dari setiap pelaku. Dengan adanya program berbasis lingkungan kami optimis kesejahteraan kelurahan dan lingkungan akan meningkat. Agar teknis pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana program maka perlu diadakan sosialisasi ke setiap kelurahan atau lingkungan yang ada di kelurahan singkil.

Tahapan pelaksanaan di tingkat pemerintah daerah mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada penguatan kapasitas pelaku, pemahaman terhadap program, tugas pokok dan fungsi dari setiap pelaku.

## Tinjauan Pustaka

Menurut George C. Edward III (dalam Winarno, 2012 : 177) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Menurut Budi winarno dalam bukunya yang berjudul teori dan proses kebijakan publik menjelaskan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut : “ implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan Teknik

yang berkerja Bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan “ ( winarno,2005:101).

Menurut berdadine R.Wijaya dan Susilo supardo (2006:81), mengatakan bahwa implementasi adalah proses pentransformasikan suatu rencana kedalam praktik. orang sering beranggapan bahwa implementasinya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau parapengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang substansif. Kebijakan ditulis dalam bahasa Inggris Policy, sedangkan kebijaksanaan ditulis dalam bahasa Inggris Wisdom. Menurut Thomas Dye dalam (Inu Kencana Syafie, 2011:115) dalam bukunya yang terkenal *Introducing Public Policy* mengatakan kebijakan public adalah: “whatever government choose, to do or not to do”, artinya kebijakan Negara adalah apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sama sekali. Sementara Lasswel dan Kaplan (Abidin, 2012:6) melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik.

Menurut Carl Friedrich dalam (Solichin A. Wahab, 2014:9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo kebijakan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilakanakan oleh pejabat pemerintah atau Negara atas nama instansi yang

dipimpinnya (presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota dll) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintahan dan pembangunan, guna mengatasi pembangunan tertentu atau mencapai tujuan tertentu dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan yang telah di tentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk keputusan formal.

Kartasmita dalam (Edy Sutrisno, 2009:15), mengatakan kebijakan adalah merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut.

Kebijakan atau policy penggunaannya sering disamaartikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan. Sedangkan policy menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersifat umum atau khusus, berdasarkan luas maupun semit, transparan maupun tidak jelas dan terinci tau global.

Dengan demikian pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu dengan memproyeksikan program-program. Subarsono (2005 : 87) mengatakan bahwa kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2012 : 149) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Didalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa didalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.

“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives”(suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 2010:295). Parmadi (2009) Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem, sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Dimana hubungan antara sistem Infrastruktur dengan sistem-sistem yang lain harus merupakan suatu sistem yang terintegrasi, seperti sistem sosial, sistem ekonomi, dan fisik infrastruktur.

“Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas, jasa-jasa dan instalansi-instalansi dasar yang dipergunakan untuk mengfungsikan suatu masyarakat seperti sistem-sistem transportasi, komunikasi, air, listrik dan institusi-

institusi publik seperti sekolah, kantor pos dan penjara” (Ja’far, 2007).

Penyediaan infrastruktur dasar sesungguhnya merupakan prasyarat bagi tercapainya kemajuan suatu masyarakat. Oleh karena itu, guna memacu pembangunan di daerah tertinggal, program utama yang harus dilakukan adalah menyediakan sarana dan prasarana dasar untuk mendorong tumbuhnya investasi demi kemajuan suatu masyarakat. Sarana dan prasarana dasar seperti jalan raya, listrik, air bersih dan telekomunikasi, harus tersedia secara layak atau memadai. “Infrastructure means all the facilities used to deliver energy, water and sanitation, telecommunication and transport services” (Estance, 2006:1).

## Metode Penelitian

(Moleong, 2004) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keadaan objektif/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Lurah Kelurahan Singkil Dua (1 orang)
2. Tokoh Masyarakat (perwakilan dari 3 lingkungan yang ada di Kelurahan

- Singkil Dua)
3. Kepala Lingkungan (pewakilan dari 3 lingkungan yang ada di Kelurahan Singkil Dua
  4. Masyarakat yang ada di kelurahan dari perwakilan dari beberapa kelurahan (3 lingkungan ) Yang akan menjadi fokus penelitian ini pada metode pelaksanaan kebijakan program berbasis lingkungan di kelurahan Singkil kecamatan singkil kota Manado dan dapat di rinci yaitu implementasi program/kebijakan pemerintah dalam proses program berbasis lingkungan :
    - a. Perioritas pelaksanaan program berbasis lingkungan
    - b. Penyaluran anggaran dalam pelaksanaan program berbasis lingkungan
    - c. Kendala hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program berbasis lingkungan

## Hasil Penelitian

Dalam implementasi suatu program memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik dari pada seluruh implementasi kebijakan atau unit pelaksana. selaras yang dikemukakan George C. Edward III, bahwa diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu program.

Berdasarkan Teori George C. Edward III terdapat empat variabel yaitu:

1. Komunikasi  
Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan , dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok

sasaran ( target group ) , sehingga akan mengurangi distorsi implementasi . Pada aspek komunikasi sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi yang ada di kelurahan singkil dilakukan tetapi belum maksimal. Karena dilihat masyarakat belum paham dengan adanya program berbasis lingkungan di kelurahan singkil kota manado.sosialisa dalam program berbasis lingkungan ini belum dapat berjalan dengan baik . pemerintah di kelurahan singkil perlu memiliki kebijakan yang efektif sehingga sosialisai harus dapat berjalan dengan efektif . Pemerintah di kelurahan singkil perlu memiliki strategi dan kebijakan yang memenuhi syarat berdirinya program berbasis lingkungan sesuai dengan peraturan walikota no tahun 2011 tentang PBL-Mapaluse. Dan masih banyak masyarakat yang belum tau tentang program berbasis lingkungan , kebijakan strategi oleh pemerintah kelurahan harus diumumkan secara langsung atau membuat suatu keputusan bersama antara masyarakat dengan pemerintah yang ada di kelurahan. Pemerintah kelurahan singkil kota manado perlu memiliki Kebijakan yang memenuhi syarat yang berdirinya program berbasis lingkungan sesuai peraturan walikota no tahun 2011 tentang PBL-MAPALUSE. Karena aspek tersebut merupakan faktor yang harus dimiliki beridirinya program berbasis lingkungan yang sudah diatur. Metode yang digunakan yaitu lewat sosialisasi antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan singki di kota manado

2. Sumber daya  
Sumber daya , dimana meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten , tetapi

apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Pada aspek ini di lihat dari sumber daya yang ada di kelurahan singkil di mana sumber daya kemampuannya yang masih belum di perbaiki atau masih kurang kejelasan dalam terwujudnya suatu program yang sudah dijalankan namun masih belum ada kejelasan lewat komunikasi atau sosialisasi antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan singkil di kota manado. sumber daya masih minim di sebabkan tidak semua kepala lingkungan memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah atas / sederajat sarjana dan terlebih tidak menguasai IT, sehingga dalam pembuatan proposal pengajuan dana kegiatan pembangunan mengalami hambatan. hal yang cukup rumit ini menjadi faktor keterlambatan pencairan dan untuk mulai pembangunan.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang di miliki oleh implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980:98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

Aspek ini cukup rumit ini menjadi faktor keterlambatan dana untuk memulai pembangunan. Kemudian disamping proposal penhajuan, pada tahap akhir kegiatan para kepala lingkungan harus membuat laporan pertanggung jawab hasil kegiatan yang dilakukan sehingga terjadi keluhan dari sebagian besar kepala lingkungan yang kurang mengerti bagaimana cara pembuatannya.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampian laporan (Edward III, 1980:125) struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur birokrasi organisasi adalah standart operating procedure (SOP) dan fragmentasi.

Pada aspek ini dilakukan menunjukkan struktur birokrasi penerapan program PBLM-MAPALUSE yang ada di kota manado sudah berjalan kurang baik karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, masyarakat merasa tidak sangat terbantu dengan adanya program ini. Karena dengan program ini, infrastruktur yang dulunya rusak atau tidak ada, sekarang masih belum di perbaiki dan diadakan. contohnya pembuatan jalan setapak, selokan, saluran air, bak sampah dll di tiap

lingkungan atau di tiap lorong yang ada di kelurahan singkil kota manado

Penerapan program PBL-Mapaluse yang ada di Kota Manado sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Selain itu, masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Karena dengan program ini, infrastruktur yang dulunya rusak atau tidak ada, sekarang sudah diperbaiki dan diadakan. Contohnya pembuatan jalan setapak, selokan, saluran air, lampu jalan, pengadaan kursi-kursi untuk kepentingan kemasyarakatan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata program Pembangunan Berbasis Lingkungan (PBL) adalah program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Manado untuk mempercepat proses pembangunan di Kota Manado dan basisnya adalah kelurahan-kelurahan sebagai ujung tombak. Pembangunan Berbasis Lingkungan (PBL) Mapaluse bukan proyek melainkan program yang harus dilaksanakan oleh Masyarakat dengan bantuan dana berbentuk hibah. Program Pembangunan Berbasis Lingkungan (PBL) Mapaluse adalah program pemerintah bersama dengan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Berarti pemerintah melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan infra-struktur, sosial serta ekonomi. Pada program ini pemerintah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang dinamakan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) yang di Ketuai oleh Kepala Lingkungan di bantu oleh tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan program ini wajib diawali dengan rapat pengurus Kelompok

Masyarakat Mapalus (KMM) untuk menentukan program yang akan dilaksanakan secara skala prioritas apa yang akan dikerjakan dan berapa besar dana yang akan digunakan dan bagaimana partisipasi masyarakat. Setelah diputuskan program apa yang dilaksanakan dan berapa besar dana yang akan digunakan, kemudian akan di umumkan kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan pekerjaan tidak akan mengambil tenaga kerja luar, tetapi akan memanfaatkan tenaga kerja yang ada di Lingkungan itu sendiri dengan pemberian upah sesuai dengan upah kerja tukang. Dengan sistem ini maka dana yang keluar hanya untuk pembelian bahan baku sedangkan untuk upah tenaga kerja tetap tinggal di Lingkungan dan diterima oleh para pekerja.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan implementasi program dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program, maka pelaksanaan dari pada program berbasis lingkungan belum berjalan dengan baik, karena masih banyak masalah seperti: Warga masyarakat singkil yang masih belum paham dengan program berbasis lingkungan, penyaluran Dana masih banyak serta masih banyak kekurangan yang perlu di perhatikan untuk di perbaiki.
2. Tahapan pelaksanaan program berbasis lingkungan dimulai dengan sosialisasi dengan masyarakat. pendataan, verifikasi, penyaluran dana, pembangunan atau infrakstruktur kembali serta

pertanggung jawab . dalam tahapan pelaksanaan ini masih di temukan sejumlah ketidak berhasilan diantaranya pemerintah kelurahan tidak mensosialisasi di tiap kelurahan program berbasis ini tidak berjalan dengan baik .

3. Program berbasis ini menunjang kebutuhan masyarakat terlebih masyarakat menengah bawah dan juga sangat membantu infrastruktur di lingkungan mereka tinggal baik pembangunan jalan , selokan , lampu jalan , talud , dll dengan digunakan untuk kebutuhan masyarakat . dalam hal politik dengan adanya , program ini maka masyarakat menjadi lebih simpatik teradap pemerintah karena terbukti dalam membangun serta mensejahterakan masyarakat di kelurahan singkil.
4. Dengan adanya program berbasis lingkungan ini menambah kesadaran dan kepeduliannya terhadap lingkungan sehingga partisipasi masyarakat tersalur dalam bentuk swadaya yang diberikan sesuai kemampuan dalam hal pemberian tenaga , materi , pendapat , konsumsi tambahan.
5. Kebijakan Implementasi program PBL Mapaluse sangat berperan dalam mendukung pencapaian pembangunan di Kota Manado, terlebih khusus pelaksanaannya di lingkungan-lingkungan yang tidak bisa dijangkau langsung oleh Pemerintah Daerah.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu saran-saran untuk kelanjutan Program Berbasis Abdul Syukur Ibrahim (Ed.). (2009). *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sekretariat:  
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Lingkungan (PBL) Mapaluse sebagai berikut:

1. Program Berbasis Lingkungan (PBL) perlu dilanjutkan.
2. Pembangunan Berbasis Lingkungan (PBL) harus ditingkatkan lagi terutama dalam hal pendekatan pemerintah kepada masyarakat.
3. Bagi pemerintah kelurahan Singkil Hendaknya dapat lebih lagi maksimalkan perannya selaku agen pelaksanaan di tingkat kelurahan yang bertanggung jawab melakukan koodinasi kepada masyarakat serta kepala lingkungan . koordinasi berupa pertemuan atau melalui rapat yang harus lebih sering dilakukan guna terbangunnya komunikasi yang baik.
4. Diharapkan partisipasi dari masyarakat dari berbagai golongan untuk turun langsung ke lapangan guna menambah swadaya untuk pembangunan . selain itu diharapkan agar program ini bisa meningkatkan kebersamaan keluargaan , gotong royong , dan antusia masyarakat dalam hal program berbasis lingkungan di lingkungan masing-masing.
5. Diharapkan pihak Pemerintah dalam hal ini BPMPK, lebih memperhatikan kecepatan proses pencairan dana, sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam penyaluran dana di masing-masing lingkungan, agar proses pelaksanaan program Program Berbasis Lingkungan bisa dijalankan sesuai prosedur pelaksanaannya

## DAFTAR PUSTAKA

Baradine R, Wijaya dan Susilo Supardo. 2002. *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Andi

- Cheema, G Shabbir & Rondinelli, Dennis A, 1983, “ *Decentralization and Development*”, Sage Publication, Inc.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Edy,
- Dye, Thomas R, 2011, *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Kencana Pernada MediaGroup
- Edward III, George C. (2012:17), *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington
- Friedrich Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: Mc Graw-Hill.
- Meleong Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabet
- Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Edisi Keempat)*. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Setia.Solichin, Wahad. 2014. *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta :Alfabeta, cv.
- Syukur Abdullah 2011. *Laporan Temu Kajian Posisi dan Peran ilmu Administrasi Negara dan Manajemen* , Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Celeban Timur UH III/54B Yogyakarta
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.
- Winarno, Budi. (2005). *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Pressindo.
- Sumber-sumber lain :**
- Peraturan Presiden No.7 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Peraturan dalam negeri republik Indonesia No.32 tahun 211 tentang pedoman pemberian hiba dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- Peraturan daerah No.9 Tahun 2011 Tentang Penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD) tahun 2015-2016
- Peraturan walikota No. Tahun 2011 Tentang PBL-MAPALUS